



Vol. 8 No. 1, Juni 2024

Jurnal HISTORICA

E-ISSN: 2964-9269

ISSN: 2252-4673



Publisher:
History Education Study Program
University of Jember



Vol. 8 No. 1, 2024

Jurnal HISTORICA

E-ISSN: 2964-9269
ISSN: 2252-4673

- | | |
|---|-----|
| <i>Oen Boen Ing's Role during Indonesian Independence Revolution Period on 1945-1949</i>
<i>Herdiona Hellen Herdadian, et al.</i> | 1 |
| <i>Comparison Of Education Policies In Indonesia And Finland As Well As The Implementation Of The Concept Of Multiculturalism In Historical Learning Serta Implementasi Konsep Multikulturalisme Dalam Pembelajaran Sejarah</i>
<i>Inez Kalyana Azmi</i> | 19 |
| <i>The Use Of Chairil Anwar's " Aku" Poem In History Learning</i>
<i>Adita Pratiwi</i> | 43 |
| <i>Mohammad Roem's Skills As A Negotiator In The Roem-Royen Negotiations</i>
<i>Rifqoti Ulya Dewi</i> | 53 |
| <i>Moving To Become Kromo Lawi</i>
<i>Petrik Matanasi</i> | 65 |
| <i>The Impact of Teacher Welfare on School Effectiveness</i>
<i>Diki Darmawan, et al.</i> | 125 |
| <i>The Effect of Experiential Learning Model Integrated with Teachmint Media on Learning Motivation and Student Learning Outcomes in History Subjects</i>
<i>Sabtiya Pratiwi, et al.</i> | 136 |
| <i>The Dynamics of Green Revolution Implementation in The Rise Farming Sector in Lamongan from 1970 to 1998</i>
<i>Afrida Nurlaily Romadhona, et al.</i> | 158 |
| <i>The Effect of Flexiquiz Technology Integrated Problem Based Learning Model on Creative Thinking Skills and Learning Outcomes of Class X Students in History Subject</i>
<i>Pramodia Dyah Rarasandti, et al.</i> | 181 |
| <i>Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia in Banyuwangi</i>
<i>Damar Wicaksono, et al.</i> | 197 |



**Comparison Of Education Policies In Indonesia And Finland As
Well As The Implementation Of The Concept Of Multiculturalism
In Historical Learning**

Inez Kalyana Azmi¹

¹Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Semarang

Email: inezazmi@students.unnes.ac.id.

Abstract

This article seeks to analyze education policy in Indonesia and make an in-depth comparison on the aspects of curriculum, human resource management, and infrastructure as well as its relation to the implementation of the concept of multiculturalism in history learning. Furthermore, this article describes the educational policies used in Indonesia and the problems that occur. Then the researcher compares it with the education policy in Finland, which is included in the category of countries with the best quality of education in the world. Based on this, the research problems can be formulated as follows: (1) how is the education policy in Finland?, (2) how is the education policy in Indonesia?, (3) how is the difference between education policy in Indonesia and Finland?, (4) how is the implementation of multiculturalism in history learning?. As for the collection of data sources, researchers use literature sources by conducting literature reviews from relevant scientific sources and then analyzed using simple and communicative sentences for easy understanding. The purposes of writing this article are: (1) to fulfill the requirements of the History of International Relations course assignment, (2) to know the comparison of education policies in Indonesia and Finland, (3) to understand multicultural education and the implementation of

multiculturalism in history learning, (4) to be used as reference material for Indonesia to further improve the quality of education by transforming education policies that are tailored to the characteristics, opportunities, and challenges of existing education and can adopt policies enacted by the country of Finland which has proven successful in improving education in its own country.

Keywords: Education Policy, Multiculturalism, History Learning, Indonesia, Finland

PENDAHULUAN

Kolaborasi dalam lingkup internasional memang sangat dibutuhkan oleh suatu negara dalam segala bidang, khususnya dalam bidang pendidikan. Secara keseluruhan, pendidikan mencakup peran dan tanggung jawab untuk meningkatkan dan melestarikan martabat manusia dengan menyebarkan nilai-nilai pengetahuan dan keterampilan (Hayati *et al.*, 2024). Proses pendidikan pada dasarnya memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi siswa supaya mampu menghadapi realitas yang ada di dunia. Pendidikan juga menjadi salah satu indikator utama pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dalam suatu bangsa. Pada umumnya, pendidikan diartikan sebagai upaya memajukan budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak (Ratmelia, 2018). Pendidikan merupakan suatu proses pembudayaan yang tidak hanya diorientasikan untuk mengembangkan pribadi individu lebih baik, tetapi juga menjadi masyarakat yang baik. Dalam hal ini, pendidikan tentunya membantu individu untuk mengenal potensi yang mereka miliki supaya dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kemajuan dirinya, lingkungannya, dan bangsanya di masa yang akan datang (Musyadad *et al.*, 2022). Kemudian, hendaknya pendidikan yang dilaksanakan di sekolah mampu untuk mengolah daya pikir, karsa, rasa, dan raga individu supaya dapat memperkaya kebudayaan bangsa, seperti sistem pengetahuan, nilai, dan perilaku bersama (Yudi, 2020). Pendidikan merupakan hal yang penting bagi seluruh umat manusia di dunia, yang mana menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional Pasal 1 yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan suatu usaha yang secara sadar dan terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran dan kondisi belajar yang berkualitas agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi yang dimilikinya seperti kepribadian, pengendalian diri, akhlak mulia, serta keterampilan untuk dirinya sendiri, masyarakat, bangsa dan juga negara (Muslim *et al.*, 2021). Menurut Schinkel *et al* (2016) menyatakan bahwa pendidikan juga mampu memberikan kontribusi pada makna hidup seseorang dengan meningkatkan kondisi kehidupan seseorang tersebut, sehingga dapat lebih baik dari sebelumnya. Tentu, dalam penerapan pendidikan dalam kehidupan seseorang, maka dibutuhkan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan hal tersebut dapat disebut dengan kebijakan pendidikan.

Kebijakan pendidikan merupakan salah satu agenda dari pemerintah di seluruh dunia yang mana berbentuk sekumpulan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan sistem pendidikan yang dijalankan oleh institusi lembaga pendidikan sekaligus menjadi sebuah perencanaan dan pedoman dalam pengambilan keputusan agar tujuan pendidikan dari suatu negara dapat terwujud (Bell & Stevenson, 2006). Kebijakan pendidikan menjadi penentu arah perkembangan pendidikan bangsa Indonesia (Swastika *et al.*, 2016). Menurut Viennet & Pont (2017) menyatakan bahwa kebijakan pendidikan merupakan program yang ditumbuhkembangkan oleh otoritas publik, diarahkan kepada para aktot pendidikan, diinformasikan oleg nilai serta ide-ide, dan dilaksanakan oleh para professional dan administrator pendidikan. Kebijakan dan pendidikan merupakan dua istilah yang berbeda dan masing-masingnya memiliki arti yang penting. Kebijakan dalah seperangkat tindakan yang memiliki tujuan tertentu dan harus diikuti oleh seorang pelaku untuk memecahkan masalah yang ada (Saleh, 2020). Merentek *et al* (2023) menjelaskan bahwa kebijakan merupakan bagian dari perencanaan yang membantu lembaga pemerintah, kelompok, aktor dalam bidang pendidikan, ataupun pejabat untuk membuat keputusan mengenai sumber daya, tenaga, waktu guna mencapai tujuan pendidikan yang berkaitan erat dengan perencanaan sumber daya manusia di dalamnya. Lebih lanjut, kebijakan pendidikan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk memecahkan

permasalahan yang berkaitan erat dengan sistem pendidikan (Oktavia *et al.*, 2021). Seiring dengan perkembangan zaman dan pelaksanaan otonomi daerah, sistem pendidikan nasional dituntut untuk melaksanakan perubahan dan penyesuaian untuk mewujudkan pendidikan yang demokratis dengan memperhatikan kemajemukan masyarakat Indonesia. Namun, pada kenyataannya pendidikan di Indonesia masih dimanfaatkan dan menjadi alat dalam kepentingan politik dan ideologi. Bahkan, dalam penelitian yang dilakukan oleh Amri *et al* (2021) menyatakan bahwa di Indonesia, antara politik dan pendidikan sangat terikat kuat, yang mana untuk mempertahankan kekuasaannya, para penguasa sangat mempengaruhi kegiatan pendidikan. Hal tersebut dapat dilihat setiap tahapan pemilu, kebijakan pendidikan selalu menjadi sorotan utama dalam persaingan politik. Setiap terjadi pergantian Menteri, kurikulum pun turut serta berubah yang kemudian berbagai persoalan muncul manakala konten humanisme tidak dimasukkan ke dalam kurikulum dan menambah bobot tersendiri bagi orang tua dalam hal pendanaan sekolah. Mungkin jika pergantian kurikulum terjadi, maka berarti mengganti buku dan menyebabkan pengeluaran untuk pendidikan dapat lebih banyak dari sebelumnya (Ishak, 2022). Tantangan pendidikan di Indonesia sebagai negara berkembang sangat banyak dan perlu untuk dikaji lebih dalam, seperti persoalan sumber daya yang terbatas, infrastruktur yang kurang memadai, dan juga terjadinya kesenjangan sosial-ekonomi pada masyarakatnya (Supriandi *et al.*, 2023). Tidak sampai disitu, persoalan pendidikan di Indonesia lainnya, yakni persoalan kurikulum, kualitas kompetensi dari pendidik, sampai dengan aspek kepemimpinan sekolah yang pada dasarnya harus membentuk citra pendidikan yang baik, namun malah banyak yang menimbulkan konflik internal antara pendidik satu dengan yang lainnya juga perlu untuk diperhatikan (Tintingon *et al.*, 2023).

Kebijakan pendidikan yang diberlakukan di Indonesia perlu dikaji lebih mendalam supaya dapat menciptakan pendidikan berkualitas bagi generasi bangsa di masa yang akan datang. Pendidikan yang berkualitas akan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas pula. Dalam kebijakan pendidikan tersebut, antara kebijakan pendidikan yang diberlakukan di Indonesia dari segi sumber daya

manusia, sarana prasarana, serta kurikulum yang digunakan seyogyanya perlu untuk diperbaharui dan ditelisik lebih mendalam seperti kebijakan pendidikan yang diberlakukan di negara Finlandia. Finlandia dalam beberapa dekade ini mentransformasikan sistem pendidikan yang dapat menjadikan negaranya sebagai negara dengan pendidikan terbaik di dunia, yang mana hal tersebut didasarkan pada hasil tes yang dilaksanakan oleh OECD (*Organization for Economic Cooperation & Development*), yakni berupa hasil tes PISA (*Programme for International Students Assessment*) yang mana negara Finlandia berada di kategorin negara teratas dengan kualitas pendidikan terbaik dilihat dari *science*, *reading*, dan juga *mathematics* pada tahun 2015. Sementara Indonesia masih berada jauh di bawah rata-rata (Adha *et al.*, 2019). Menurut Putra (2015) negara Finlandia dapat menempati negara dengan sistem Pendidikan terbaik di dunia dikarenakan pendidikan yang digunakan oleh negara tersebut dilandasi dengan tanggungjawab, kesetaraan, berbudaya, serta kerjasama, sehingga mampu mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Hal tersebut bisa dijadikan rujukan ataupun referensi bagi negara Indonesia untuk lebih meningkatkan kualitas kebijakan pendidikan yang digunakan dalam segi kurikulum yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat Indonesia, sarana prasarana yang digunakan untuk mendorong pendidikan yang berkualitas serta merata sampai daerah 3T, dan juga manajemen sumber daya manusia yang digunakan, seperti kualifikasi pendidik atau guru yang dapat mengajar di sekolah dengan melalui tahap rekrutmen secara adil dan jujur.

Negara Indonesia merupakan negara berkembang dengan penduduk yang cukup majemuk dengan keanekaragaman suku, bahasa, budaya, agama, ras, budaya, dan etnisnya. Hal tersebut bisa saja membuat perpecahan dan konflik antar masyarakat di Indonesia (Wales, 2022). Dengan demikian, perlu adanya multikulturalisme yang dianggap sebagai solusi tepat karena memiliki konsep keragaman budaya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Indonesia perlu mengadopsi konsep multikulturalisme untuk menghindari konflik atau perpecahan yang bisa saja terjadi. Multikulturalisme merupakan ungkapan yang digunakan sebagai cara pandang seseorang terkait berbagai kehidupan di

dunia ataupun kebijakan yang harus didasari dengan penerimaan akan pluralitas, keragaman, dan kebhinekaan sebagai realitas yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat (Munif, 2018). Konsep multikulturalisme perlu ditanamkan dan diinternalisasikan kepada peserta didik di sekolah, yang mana multikulturalisme ini nantinya akan menjadi penghubung perbedaan-perbedaan yang terdapat di lingkungan pendidikan atau di lingkungan sekolah, sehingga dapat meminimalisir terjadinya konflik dan perpecahan. Peserta didik nantinya dapat memahami, menerima, dan menjunjung tinggi perbedaan yang ada pada setiap kalangan di sekolah (Wales, 2022).

Multikulturalisme juga dapat dikaitkan dengan pembelajaran sejarah di kelas. Pembelajaran Sejarah merupakan pembelajaran yang tidak hanya mempelajari tentang masa lalu, tetapi juga masyarakat di masa lampau. Mulai dari budayanya, etnisnya, sukunya, sampai dengan ras yang terdapat di negara Indonesia. Sejarah merupakan ilmu yang tidak akan tergerus oleh zaman, bahkan cenderung dinamis mengikuti perkembangan zaman dan dapat digunakan sebagai landasan hidup untuk menghadapi kenyataan di masa kini maupun di masa yang akan datang (Nasjum, 2020). Penanaman nilai multikultural dalam pembelajaran sejarah perlu dilakukan seperti melalui pengembangan model pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai multikultural (Lestariningsih *et al.*, 2018). Nilai-nilai multikultural dalam materi sejarah dapat diambil contoh berasal dari materi sejarah tentang interaksi budaya Islam, Hindu, dan Budha. Yang dalam penerapannya, peserta didik diharapkan tidak hanya mengerti tentang fakta sejarah saja, tetapi juga dapat memaknai sejarah tersebut untuk saling menghargai perbedaan yang ada, menjunjung toleransi, dan menyadari bahwa negara Indonesia merupakan negara yang dibangun atas etnis serta agama yang beragam, sehingga perlu tercipta keharmonisan bermasyarakat yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah peserta didik. Terdapat beberapa ciri-ciri dari pendidikan multikultural sebagai berikut:

- a.) Materi pembelajaran yang digunakan ialah mengajarkan nilai-nilai luhur kemanusiaan, nilai-nilai kempok etnis atau kultural, serta nilai-nilai bangsa.
- b.) Metode yang digunakan dalam pendidikan ini biasanya secara demokratis, yang menghargai segala aspek perbedaan dan keberagaman budaya bangsa serta

kelompok etnis.

c.) Evaluasi pembelajaran ditentukan berdasarkan penilaian terhadap tingkah laku peserta didik yang biasanya meliputi tindakan, apresiasi, dan persepsi terhadap budaya lainnya (Mahfud, 2013).

d.) Memiliki tujuan untuk membentuk manusia yang berbudaya dan menciptakan masyarakat yang berbudaya.

Pendidikan multikultural yang diintegrasikan dalam pembelajaran sejarah perlu dirancang dan diimplementasikan sedemikian rupa supaya mampu memberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu (Lestariningsih, 2018). Dalam hal ini, guru pun memiliki peranan penting dalam pengimplementasian konsep multikultural dalam pembelajaran sejarah. Namun, tidak adanya penanaman nilai-nilai multikultural yang tercakup dalam kurikulum, menyebabkan sulitnya para guru untuk mengimplementasikan konsep multikulturalisme dalam pembelajaran di sekolah. Sehingga, hal tersebut bisa menjadi sebab dari banyaknya kasus-kasus pembullying, sikap acuh tak acuh dan intoleransi, serta konflik antar peserta didik di sekolah. Berdasarkan keterangan yang telah dijelaskan, penelitian ini berupaya menganalisis kebijakan pendidikan di Indonesia dan melakukan komparasi dengan kebijakan pendidikan di Finlandia yang notabene menjadi negara terbaik dalam pendidikan berkualitas di dunia, serta kaitannya dengan pengimplementasian konsep multikulturalisme dalam pembelajaran sejarah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan penelitian kualitatif yang dalam menganalisis data dilakukan secara deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk mengamati kondisi objek alamiah, yang mana dalam hal ini peneliti lah yang merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2005). Menurut Nasution (2023) penelitian kualitatif adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami fenomena dan melakukan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang mudah dipahami. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus secara deskriptif dan tidak dituliskan dalam bentuk

statistik. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang menjelaskan sebuah peristiwa atau fenomena sosial yang fenomenanya tidak dapat diukur secara numerik, sehingga pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan pada kealamian sumber yang didapatkan (Fadli, 2021). Metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari perilaku atau peristiwa yang diamati oleh peneliti (Bogden & Biklen, 1992). Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan dari Nugrahani (2014) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang data temuannya tidak diperoleh melalui bentuk statistik, tetapi lebih merujuk pada analisis data secara non-matematis.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka, sehingga memiliki tujuan untuk melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber literatur yang telah ditelaah, kemudian dianalisis secara interaktif oleh peneliti dengan tahapan yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan (Rijali, 2019). Selanjutnya, penulis melakukan tahapan dalam penelitian kualitatif sebagai berikut: (1) pengumpulan data, yang mana data didapatkan dari buku, artikel ilmiah, maupun sumber tertulis yang kredibel dan relevan, sesuai dengan tema kajian, (2) peneliti melakukan pengolahan data dengan menjelaskan secara akurat dan singkat korelasi antar informasi yang telah didapat, (3) peneliti melakukan penarikan kesimpulan awal yang bersifat fleksibel, (4) pengujian keabsahan melalui triangulasi data, dan terakhir (5) peneliti menarik kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan secara logis dan sistematis (Syahputra *et al.*, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pendidikan di Indonesia

Kebijakan pendidikan yang diberlakukan di negara Indonesia seringkali mengalami perubahan yang cukup signifikan dan membuat masyarakat kebingungan dengan kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah. Bahkan, dalam rentang 71 tahun sejak tahun 1947, Indonesia telah melakukan pergantian dan perubahan kurikulum sebanyak 10 kali dengan tujuan untuk meningkatkan

kualitas pendidikan. Adha *et al* (2019) menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia sedang berkembang menuju *social education 5.0* dari era revolusi industri 4.0. Terlebih lagi sejarah di masa lampau yakni pasca Orde Baru, terjadi perubahan mendasar dalam bidang pendidikan, bergesernya paradigma pendidikan akibat adanya modifikasi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah (PP) yang tentunya akan dipengaruhi oleh transformasi paradigma yang lama menjadi paradigma baru (Adnani *et al.*, 2023). Tanggungjawab pemerintah adalah melakukan penetapan terhadap kebijakan pendidikan yang telah disusun dalam rangka mewujudkan suatu negara yang menunjang kesejahteraan. Tentu, dalam hal ini kurikulum pendidikan termasuk dalam kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah dan kurikulum negara Indonesia telah mengalami revisi secara berkala. Perubahan kebijakan pendidikan yang dilakukan Indonesia yang cukup signifikan ialah penghentian dan penghapusan kebijakan Ujian Nasional (UN), kemudian penghentian sementara kurikulum 2013, bantuan siswa kurang mampu atau Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan berbagai perubahan kebijakan lainnya yang membuat banyak sekali protes dan gejolak dari masyarakat, terutama para guru kepada pemerintah (Rozak, 2021). Tintingon *et al* (2023) menyatakan bahwa berbagai permasalahan yang ditimbulkan akibat dari perubahan ataupun pergantian kebijakan pendidikan di Indonesia, seperti biaya pendidikan, kompetensi guru, sertifikasi guru, dan juga pendidikan gratis seringkali menjadi pemahasan utama dalam setiap perbincangan karena biasanya isu-isu tersebut akan pula memberikan dampak yang signifikan terkait kebijakan operasional yang dijalankan. Pergeseran, pergantian, serta perubahan kebijakan pendidikan di Indonesia sering terjadi sebagai upaya memajukan kualitas pendidikan. Namun, output yang dihasilkan pun belum dapat memenuhi tuntutan era globalisasi pada masa kini. Sehingga, tatanan persekolahan dan pendidikan di Indonesia saat ini masih perlu untuk diperbaiki dan ditingkatkan kembali supaya dapat memenuhi tantangan globalisasi sekaligus perubahan zaman yang sedang berlangsung. Seperti contoh, ketika pada tahun 2020, Indonesia mengalami perubahan kebijakan pendidikan dari yang biasanya peserta didik datang ke sekolah untuk belajar, saat pandemi Covid, peserta didik melakukan pembelajaran jarak jauh atau secara daring. Hal tersebut

mengakibatkan banyaknya peserta didik yang tidak dapat memaksimalkan pembelajaran daring karena berbagai macam alasan, sehingga perlu adanya upaya untuk mengubah dan memperbaiki pula kerangka strategi dalam pengajaran untuk meminimalisir berbagai masalah sarurat yang kerap kali terjadi di negara Indonesia (Jaysurrohman *et al.*, 2021).

Pendidikan Indonesia yang sedang memasuki *social education 5.0* mengisyaratkan di dalamnya agar penerapan pendidikan bisa dilaksanakan secara demokratis, adil, tidak diskriminatif dan dapat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, nilai kultural, nilai keagamaan, serta kemajemukan bangsa (Parker & Raihani, 2011). UU SISDIKNAS pasal 5 ayat 2 sampai dengan ayat 4, menjelaskan bahwa hanya warga negara yang memiliki kelainan emosional, fisik, mental, intelektual, sosial, atau tinggal di daerah terpencil, masyarakat adat terpencil, serta warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat Istimewa berhak memperoleh pendidikan. Dalam hal ini, secara tersirat lembaga pendidikan nasional begitu antusias untuk melakukan kompetisi, memilih peserta didik yang memiliki potensi dan kecerdasan diatas rata-rata dibandingkan siswa yang memiliki potensi dibawah rata-rata. Pemilihan peserta didik juga cukup rumit, yang mana peserta didik yang akan memasuki pendidikan dasar, minimal berumur 6 tahun ataupun 5,5 tahun jika disertai dengan rekomendasi tertulis dari psikologi professional. Untuk mencapai pendidikan yang berkualitas, maka diperlukan pula tenaga pendidik atau guru yang berkualitas dan kompeten dalam memberikan pengetahuan serta keterampilan pada peserta didik. Mengacu pada UU SISDIKNAS pasal 39 ayat 2, pendidik adalah tenaga professional yang memiliki tugas sebagai perencana, pelaksana kegiatan pembelajaran, penilai hasil belajar, pelaksana pelatihan, dan juga melaksanakan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat terutama untuk pendidik pada pendidikan tinggi. Guru di Indonesia harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang mampu mendukung tercapainya tujuan pendidikan, sehat jasmani dan rohani, serta maampu menjadi agen pembelajaran yang kompeten (Blazar & Kraft, 2017). Dalam hal ini, PERMENDIKNAS Nomor 6 tahun 2007 menjelaskan tentang standar kompetensi tenaga pendidik mulai dari tingkatan PAUD hingga jenjang SMA sekurang-

kurangnya ialah Diploma 4 sesuai dengan bidangnya. Proses rekrutmen guru di sekolah, tentu harus dijalankan sesuai dengan prosedur perekrutan dikarenakan guru yang baik dihasilkan dari proses rekrutmen yang baik pula. Hanya saja, proses perekrutan guru di sekolah Indonesia masih banyak yang tidak sesuai dengan aturan, misalnya banyak guru yang mengajar di sekolah, tetapi tidak sesuai dengan bidang keilmuannya. Hal tersebut tentu akan berpengaruh pada kegiatan pendidikan itu sendiri sekaligus bertentangan dengan peraturan standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang diatur oleh BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). Kemudian mengenai sarana dan prasarana yang digunakan oleh Indonesia tidak begitu maksimal untuk mendukung kebijakan pendidikan yang berkualitas.

Adha *et al* (2019) menyatakan bahwa proses pembelajaran yang dilakukan guru di Indonesia dengan di negara yang memiliki kualitas pendidikan terbaik, yakni Finlandia sangat berbeda, yang mana seluruh proses pembelajaran di pendidikan Indonesia monoton; peserta didik hanya duduk manis di bangku dan pendidik berceramah di depan kelas. Proses belajar tersebut membuat peserta didik lebih cepat bosan dengan belajar karena tidak bisa bebas berekspresi. Untuk buku-buku pembelajaran sendiri, banyak peristiwa keterlambatan kedatangan buku-buku yang disediakan oleh pemerintah sehingga membuat kegiatan belajar peserta didik terhambat. Tidak sampai disitu, sekolah-sekolah berkualitas yang terdapat di Indonesia sebagian besar diperuntukkan bagi peserta didik yang mempunyai orang tua dengan berpenghasilan tinggi saja (Adha *et al.*, 2019). Sekolah-sekolah berkualitas tersebut identik dengan biaya pendidikan yang tinggi pula dan hal tersebut cukup memberatkan bagi para orang tua yang memiliki penghasilan rendah, namun di satu sisi ingin memberikan pendidikan terbaik bagi anaknya (Widodo, 2016).

Kebijakan Pendidikan di Finlandia

Berbeda dengan kebijakan pendidikan di Indonesia seperti yang telah dijelaskan, kebijakan pendidikan di Finlandia tidak melakukan kompetisi dalam memilih peserta didik, yang mana negara Finlandia memiliki prinsip bahwa

kesetaraan pendidikan dan budaya merupakan target strategis yang sangat penting untuk mewujudkan kualitas pendidikan yang baik di Finlandia. Pemerintah mengupayakan kesejahteraan intelektual, fisik, ekonomi melalui akses pendidikan yang mudah bagi warga negara nya. Putra (2015) menegaskan bahwa prinsip kompetisi tidak digunakan dalam pendidikan di negara Finlandia, negara ini menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan keadilan serta menolak pengelolaan sekolah yang berorientasi pasar. Lebih lanjut, sistem pendidikan yang dikembangkan oleh Finlandia ialah memabngun nilai kepercayaan dan tanggungjawab, yang mana terjadi sinergitas antara guru, kepala sekolah, orang tua, dan komunitas yang terdapat di sekolah untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik guna menunjang keterampilan mereka untuk menghadapi tantangan di era globalisasi seperti di masa kini. Budaya kepercayaan di Finlandia tersebut terus diperkuat dengan adanya kerjasama dan kolaborasi yang dipercaya oleh Finlandia bahwa keduanya akan mampu bersaing di taraf internasional (Putra, 2015).

Rekrutmen tenaga pendidik yang dilakukan oleh negara Finlandia pun sangat berbeda dengan rekrutmen yang dilakukan oleh Indonesia. Negara Finlandia memberlakukan kualifikasi akademik guru di Finlandia yang paling dasar adalah master. Bahkan, untuk menjadi seorang guru di Finlandia, mahasiswa harus melalui tiga tahap. Tahap pertama adalah pelaksanaan ujian kompetensi yang berkaitan dengan *problem solving*, tahap kedua adalah tahap wawancara; melakukan simulasi pemecahan masalah, dan tahap ketiga adalah penentu apakah seseorang tersebut bisa menjadi guru atau tidak. Goodill (2017) menyatakan bahwa guru di Finlandia diarahkan untuk memiliki kompetensi religi yang kuat melalui pendalaman iman yang dididik oleh pemimpin agamanya masing-masing. Kemudian, untuk pemilihan peserta didik nya juga tidak serumit pemilihan peserta didik yang digunakan oleh Indonesia. Finlandia memberlakukan persyaratan utama peserta didik ialah harus mencapai usia 7 tahun ketika memasuki pendidikan dasar dan peserta didik dinilai telah cukup mampu melaksanakan aktivitas fisik dan otak. Kurikulum negara Finlandia di susun oleh *The National Board of Education* yakni badan yang memiliki tugas untuk menyusun kurikulum inti secara

nasional (*Finnish National Agency for Education*, 2018).

Negara Finlandia lebih menekankan pada penguasaan bahasa dan sastra kepada peserta didiknya. Kemudian, pemerintah Finlandia juga tidak memberlakukan sistem tinggal kelas seperti kebijakan yang dilakukan di pendidikan Indonesia. Alasan utamanya ialah Finlandia ingin menjaga kesetaraan dan mental para peserta didik. Proses pembelajaran yang dilakukan di kelas juga jauh berbeda dengan proses belajar yang dilakukan di Indonesia, di Finlandia, guru membebaskan peserta didik untuk menemukan gaya belajar mereka sendiri dan apabila peserta didik merasa bosan, maka guru menyarankan kepada peserta didik untuk bermain. Kasihadi (2016) menyatakan bahwa pendidikan di Finlandia senantiasa memberikan pemahaman terhadap teori melalui kegiatan pemecahan masalah, terutama dalam ilmu eksakta. Berbeda dengan pendidikan di Indonesia yang sangat kental dengan adanya kompetisi ranking pada peserta didik. Perbedaan yang cukup mencolok ialah mengenai hari efektif sekolah di Finlandia sebanyak 190 hari/tahun, sedangkan di Indonesia sebanyak 230 hari/tahun dengan peserta didik di Indonesia masih dibebankan dengan adanya tugas atau Pekerjaan Rumah (PR) dari guru. Sementara pendidikan di negara Finlandia tidak membebankan tugas kepada peserta didiknya. Mengenai sarana dan prasarana untuk menunjang kualitasnya pendidikan di negara Finlandia ialah terdapat fasilitas bimbingan konseling wajib yang ditujukan pada peserta didik dan untuk peserta didik yang membutuhkan fasilitas khusus pun akan diutamakan dan tidak dibedakan sekolahnya. Berbeda dengan di Indonesia, peserta didik yang membutuhkan penanganan khusus tidak bersekolah di sekolah umum, melainkan di Sekolah Luar Biasa (SLB). Peserta didik di Finlandia mendapatkan makan siang secara gratis dengan makanan yang bergizi tinggi dari pemerintah dikarenakan negara tersebut yakin bahwa kecerdasan peserta didik juga dipengaruhi dengan asupan gizi yang baik. Buku pembelajaran juga diberikan secara gratis dari pihak sekolah dengan pendistribusian yang tepat waktu agar meminimalisir terhambatnya kegiatan belajar peserta didik.

Dalam bidang pendidikan, negara Finlandia sangat serius untuk senantiasa meningkatkan mutu pendidikan di negaranya. Membangun hubungan secara

internasional menjadi salah satu cara untuk mewujudkan kualitas mutu pendidikan yang optimal. Begitu pula dengan Indonesia yang telah melakukan hubungan internasional seperti yang dilakukan oleh Finlandia. Berdasarkan hal tersebut, kebijakan pendidikan yang diberlakukan oleh pemerintah di Indonesia seyogyanya perlu untuk ditelaah lebih lanjut supaya dapat diperbaiki agar kualitas pendidikan di negara Indonesia lebih meningkat secara signifikan, mulai dari kurikulum pendidikan yang digunakan oleh Indonesia, sarana prasarana untuk mendukung pendidikan berkualitas di Indonesia, sampai dengan manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan seperti guru maupun dosen yang perlu dioptimalkan potensinya untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah disepakati dan disesuaikan dengan karakter dan budaya masyarakat negara Indonesia.

Pendidikan Multikultural

Multikultural merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menjelaskan suatu pandangan seseorang mengenai ragam kehidupan yang terdapat di dunia, seperti kebijakan kebudayaan, adanya kehidupan bermasyarakat yang menyangkut pada nilai-nilai politik, sistem, dan kebiasaan yang dianut (Lestariningsih, 2018). Meningat bahwa negara Indonesia merupakan negara yang majemuk dan dihuni oleh warga negara yang berasal dari berbagai macam etnis, ras, suku, budaya, bahasanya, maka tidak heran jika Indonesia perlu menggunakan konsep multikulturalisme dan memberlakukan pendidikan multikultural di sekolah untuk memberikan kesadaran dan pemahaman tentang multikultural pada peserta didik serta turut serta meminimalisir terjadinya perpecahan dan konflik. Pendidikan merupakan bagian dari proses untuk “memanusiakan manusia” yang dimana dalam hal ini, manusia itu mampu untuk memahami dirinya, orang lain, alam, dan lingkungan budayanya (Azzahra *et al.*, 2023). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendidikan tidak terlepas dari budaya yang melingkupinya.

Pendidikan Multikultural merupakan aspek yang cukup penting dalam sistem pendidikan yang semakin relevan dengan era globalisasi di masa kini. Pendidikan Multikultural menekankan konsep pada penghargaan, pengakuan, integrasi keanekaragaman budaya, agama, etnis, serta latar belakang sosial yang

terdapat dalam lingkungan pendidikan (Banks, 2010). Adapun tujuan dilaksanakannya pendidikan multikultural ialah mampu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mampu menghormati keberagaman, mempersiapkan peserta didik supaya dapat menjadi warga negara yang memiliki pengetahuan luas dan empati yang tinggi terhadap budaya yang dimiliki oleh negaranya (Nicto, 2017). Pendidikan multikultural semakin gencar untuk dilakukan dikarenakan arus globalisasi yang telah banyak menghapuskan batas-batas geografis sehingga membawa interaksi antarbudaya yang lebih intens (Gay, 2018). Pendidikan Multikultural dilakukan untuk mencapai persamaan pendidikan, mengembangkan kurikulum yang mendorong berkembangnya pluralisme budaya yang didasarkan atas nilai-nilai demokratis. Dalam hal ini, terdapat tiga elemen dalam pendidikan multikultural, yang pertama adalah pendidikan ini mengaskan identitas kultural seseorang dengan mempelajari dan menilai warisan budaya seseorang. Kedua, menghormati dan berkeinginan untuk memahami dan belajar mengenai etnik ataupun kebudayaan lainnya. Ketiga, menilai dan merasa senang dengan perbedaan kebudayaan yang ada dengan memandang keberadaan dari kelompok-kelompok budaya yang berbeda dalam masyarakat seseorang sebagai kebaikan yang bermakna positif untuk dipelihara. Sehingga, atas penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan multikultural merupakan suatu pendekatan pendidikan dan pengajaran yang di desain untuk memberikan pemahaman agar saling menghargai, menghormati, dan mampu merespons budaya di dalam konteks pembelajaran. Pendidikan Multikultural ini juga sudah seyogyanya dapat dikembangkan secara masif agar masyarakat Indonesia; peserta didik sekolah mampu untuk memahami pentingnya memelihara kerukunan antar sesama manusia, yang tidak hanya sebatas menghargai perbedaan, tetapi juga menjaga keharmonisan, memiliki etika dalam berpendapat kepada kelompok lain, menjunjung tinggi asas kemanusiaan, sehingga diharapkan kelak nantinya mampu mencapai kejayaan di negara Indonesia yang beragam ini (Azzahra, 2023).

Multikulturalisme Dalam Pembelajaran Sejarah

Multikulturalisme muncul pada tahun 1970-an, yang mana

multikulturalisme telah masuk ke Indonesia jauh sebelum kemerdekaan. Rahman *et al* (2021) menyatakan bahwa multikultural muncul di berbagai aspek kehidupan manusia dengan meyakini jika pengakuan dan transformasi multikulturalisme akan menjunjung tinggi nilai dalam masyarakat yang harmonis dan toleran terhadap sesama. Indonesia perlu mengadopsi konsep multikulturalisme dikarenakan bangsa ini memiliki perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan etnis. Multikulturalisme bukan hanya sekadar wacana, tetapi ideologi yang harus diperjuangkan dan dipertahan karena sangat dibutuhkan sebagai landasan tegaknya demokrasi, HAM, dan kesejahteraan hidup masyarakatnya (Prasetyo, 2021). Multikulturalisme dalam pendidikan dapat diarahkan untuk membangun karakter peserta didik dengan latar belakang budaya yang berbeda, sehingga peserta didik tersebut dapat menjunjung tinggi kemerdekaan, perbedaan, dan sikap toleransi yang kelak harapannya akan melahirkan generasi dengan motivasi tinggi dan siap untuk menghadapi perkembangan zaman (Hidayat, 2019). Perlu diketahui bahwa pendidikan multikultural dalam Kurikulum 2013 tidak berdiri sendiri terutama dalam penerapannya di Sekolah Menengah Atas (SMA), tetapi pendidikan multikultural dapat diintegrasikan dalam pembelajaran yang ada, yakni pembelajaran sejarah (Ekwandari *et al.*, 2020).

Pembelajaran adalah kegiatan belajar dan mengajar yang aktif antara guru dengan peserta didik yang dilaksanakan di dalam maupun di luar kelas secara sistematis dan terencana (Mutmainah *et al.*, 2019). Pembelajaran sejarah yang ideal ialah pembelajaran yang dapat memberikan fasilitas kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran sejarah dengan optimal (Kristanti *et al.*, 2019). Pembelajaran sejarah yang digunakan dan memiliki tujuan menemukan penyebab dan akibat dari terjadinya suatu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, maka diharapkan seseorang itu dapat menghubungkannya dalam kehidupan di masa kini (Ekwandari *et al.*, 2020). Pembelajaran sejarah memiliki berbagai materi yang dapat diajarkan kepada peserta didik, salah satunya mengenai materi Sejarah Lokal. Berbicara mengenai sejarah lokal, tentu tidak terlepas dari kearifan lokal. Kearifan lokal tersebut dapat dijadikan sumber dalam pendidikan sejarah (Ufie, 2014). Sehingga, dalam pendidikan sejarah perlu adanya

pengembangan kurikulum yang memperhatikan keragaman yang terdapat di dalam masyarakat. Tidak sampai disitu, pelaksanaan pembelajaran sejarah di kelas lebih menekankan kepada peserta didik untuk kreatif, sehingga pendidik diharapkan mampu untuk menumbuhkembangkan kreativitas peserta didik melalui pembelajaran yang berlangsung agar mampu merekonstruksi materi yang diajarkan dengan baik (Puji, 2020). Pengembangan kurikulum dalam setiap jenjang juga sudah semestinya memiliki konsep pendidikan multikultural yang dipandang dan dapat dijadikan sebagai landasan sosial dalam pendidikan sejarah dengan tetap memperhatikan nilai-nilai pluralis, humanis, dan demokratis untuk diajarkan kepada para peserta didik dalam mata Pelajaran sejarah di sekolah. Dalam hal ini, seyogyanya guru mampu untuk menerjemahkan nilai multikultural secara lebih konkrit. Misalnya pada topik materi kebangkitan nasional, yang dimana materi tersebut memiliki nilai-nilai yang hendak disampaikan, seperti nilai kebersamaan, toleransi, gotong royong, rasa senasib dan sepenanggungan dari para tokoh-tokoh pejuang bangkitnya nasional bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebutlah yang akan memberikan semangat dalam membentuk sikap untuk membangkitkan rasa nasionalisme kebangsaan dalam diri peserta didik melalui pembelajaran sejarah. Kemudian, kelokalan dalam konteks filosofi budaya, yang mana tradisi lokal telah menjadi kekuatan sekaligus penuntun kehidupan bersama masyarakat lokal yang juga menjadi sumber dalam pembelajaran sejarah. Misalnya, nilai budaya Pesta Lomban di Kabupaten Jepara, memiliki semangat untuk membuat hidup menjadi lebih baik, meningkatkan rasa Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, toleransi dengan sesama umat manusia, semangat gotong royong antar masyarakat Kabupaten Jepara, dan nilai budaya lainnya. Kearifan lokal sendiri merupakan kemampuan masyarakat untuk melakukan pengelolaan lingkungan baik secara Rohani maupun jasmani, atau dengan kata lain bahwa kearifan lokal merupakan jawaban terhadap situasi historis, geografis-geopolitis yang bersifat lokal (Ufie, 2014). Dalam hal ini, maka pembelajaran sejarah bukan lagi hanya sekadar melakukan pengajaran pengetahuan atau *transfer of knowledge*, tetapi juga *transfer of value* atau memberikan pemahaman tentang nilai-nilai yang terdapat di dalam masyarakat, sehingga tidak hanya memberikan pelajaran terkait

multikulturalisme saja pada peserta didik, namun juga membentuk karakter peserta didik agar lebih memahami dan menjunjung tinggi keberagaman yang ada.

Ufie (2014) menyatakan bahwa pendekatan multikultural hendaknya dapat membantu kurikulum sejarah manakala menetapkan prinsip-prinsip kurikulum dalam proses pembelajaran sejarah, sehingga dapat memaksimalkan potensi peserta didik untuk memahami dan mempelajari lingkungan budaya yang dapat dijadikan sebagai inspirasi dan motivasi bagi mereka untuk bisa menjadi lebih baik dari masa lampau. Sehingga, penyelenggaraan pendidikan multikultur yang berdasar pada kearifan lokal sebagai sumber pembelajaran sejarah di SMA, bisa diintegrasikan ke dalam mata pelajaran tersebut dengan optimal. Dengan adanya nilai-nilai multikulturalisme dalam pembelajaran sejarah, diharapkan bangsa Indonesia memiliki lebih banyak generasi muda yang sadar dan menjunjung tinggi sikap toleransi, saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada, serta dapat juga menciptakan perdamaian dunia yang maksimal. Selain itu, generasi muda juga dapat melekat akan pendidikan yang berkualitas supaya dapat menciptakan generasi yang berkualitas pula bagi bangsa Indonesia.

KESIMPULAN

Pendidikan merupakan suatu proses untuk memberikan pengajaran dan pelajaran kepada seseorang agar kehidupannya bisa lebih baik dari sebelumnya. Melalui pendidikan pula, seseorang bisa belajar menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Untuk mencapai hal tersebut, maka kebijakan pendidikan yang diberlakukan juga harus sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat suatu negara itu sendiri serta berkualitas. Seperti yang telah dijelaskan bahwa berdasarkan hasil tes PISA (*Programme for International Students Assessment*) Indonesia berada di bawah rata-rata suatu negara dikategorikan memiliki pendidikan yang berkualitas. Berbeda halnya dengan negara Finlandia yang dikategorikan sebagai negara dengan pendidikan berkualitas terbaik di dunia. Negara Finlandia sendiri dalam menjalankan pendidikannya, menggunakan dan mengedepankan nilai kesetaraan, keadilan, kepercayaan, tanggungjawab, kerjasama, serta kolaborasi. Lebih lanjut, Finlandia

juga memberlakukan manajemen sumber daya manusia yang mana akan menjadi tenaga pendidik di sana, seseorang yang ingin menjadi guru sekolah di Finlandia, pendidikan terakhir sekurang-kurangnya adalah S2 dan harus melewati tahapan *requirements* yang cukup rumit. Pendidikan di Finlandia juga tidak memebankan peserta didik akan tugas dan untuk kualifikasi peserta didik yang masuk ke pendidikan dasar minimal harus berumur 7 tahun. Sementara, kebijakan pendidikan yang diberlakukan oleh negara Indonesia masih menerapkan sistem rangking dan tinggal kelas, kemudian untuk kualifikasi tenaga pendidik yang digunakan sekurang-kurangnya minimal D4 dengan kualifikasi peserta didik memasuki pendidikan dasar minimal 6 tahun (5,5 tahun disertai rekomendasi tertulis dari psikologi professional). Lebih lanjut, proses perekrutan seorang pendidik juga masih sering diselewengkan oleh pihak-pihak tertentu, sehingga banyak pendidik yang mengajar tidak sesuai dengan *background* pendidikan. Tahapan proses menjadi pendidik di Indonesia pun banyak kecurangan. Dengan demikian, pemerintah Indonesia hendaknya bisa merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih efektif dan tepat sesuai dengan karakteristik, peluang, dan tantangan pendidikan di Indonesia.

Mengingat bahwa Indonesia merupakan negara yang besar dengan keekaragaman etnis, budaya, ras, bahasa dalam masyarakatnya, maka perlu pula pendidikan multikultural untuk mencegah terjadinya konflik ataupun perpecahan akibat dari perbedaan yang beragam. Pendidikan multikultural sendiri memiliki tujuan memberikan kesadaran dan pemahaman tentang multikultural pada peserta didik serta turut serta meminimalisir terjadinya perpecahan dan konflik. Pendidikan merupakan bagian dari proses untuk “memanusiakan manusia” yang dimana dalam hal ini, manusia itu mampu untuk memahami dirinya, orang lain, alam, dan lingkungan budayanya. Pengembangan kurikulum dengan mengintegrasikan multikulturalisme hendaknya dilakukan oleh seluruh satuan pendidikan di negara Indonesia dengan mengintegrasikannya pada pembelajaran sejarah. Sehingga, dengan pemahaman dan pengajaran pendidikan multikulturalisme dalam pembelajaran sejarah, maka diharapkan peserta didik dapat menjunjung tinggi sikap saling menghargai, menghormati perbedaan, dan

toleransi antar sesamanya melalui materi-materi sejarah lokal yang berbasis kearifan lokal dalam pembelajaran sejarah itu sendiri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Inez Kalyana Azmi sebagai penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dan membantu penulis dalam menyelesaikan artikel dengan judul Komparasi Kebijakan Pendidikan di Indonesia dan Finlandia Serta Implementasi Konsep Multikulturalisme Dalam Pembelajaran Sejarah sebagai salah satu rujukan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan pendidikan yang diberlakukan agar kelak nantinya generasi muda mampu menghadapi tantangan globalisasi yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, M. A., Gordisona, S., Ulfatin, N., & Supriyanto, A. (2019). Analisis komparasi sistem pendidikan Indonesia dan Finlandia. *Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, 3(2), 145-160.
- Adnani, Q. E. S., Gilkison, A., & McAra-Couper, J. (2023). A historical narrative of the development of midwifery education in Indonesia. *Women and Birth*, 36(1), e175–e178. <https://doi.org/10.1016/j.wombi.2022.06.007>.
- Azzahra, G. F., Asbari, M., & Ariani, A. S. (2023). Pendidikan Multikultural: Menuju Kesatuan Melalui Keanekaragaman. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 2(6), 1-7.
- Banks, J. A., & Banks, C. A. M. (2010). *Pendidikan Multikultural : Isu dan Perspektif (Edisi 7)*. Wiley.
- Bell, L., & Stevenson, H. (2006). Education policy: Process, themes and impact. *Education Policy: Process, Themes and Impact*, 1–192. <https://doi.org/10.4324/9780203088579>
- Blazar, D., & Kraft, M. (2017). Teacher and Teaching Effects on Students' Attitudes and Behaviors. *Educational Evaluation and Policy Analysis*, 39(1), 146–170. <https://doi.org/DOI: 10.3102/0162373716670260>

- Bogden, R. C., & Biklen, S. K. (1992). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory*. Boston: Allyn.
- Ekwardari, Y. S., Perdana, Y., & Lestari, N. I. (2020). Integrasi Pendidikan Multikultural dalam Pembelajaran Sejarah di SMA YP UNILA. *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 9(1), 15-31.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54.
- Finnish National Agency For Education. (2018). *Education System: Equal Opportunities to High Quality Education*.
- Gay, G. (2018). *Pengajaran Responsif Budaya: Teori, Penelitian, dan Praktek*. Pers Perguruan Tinggi Guru.
- Goodill, C. (2017). *An Analysis of the Educational System In Finland and the United States: A Case Study*.
- Hayati, D., Islam, U., Imam, N., Padang, B., Islam, U., Imam, N., & Padang, B. (2024). Sistem Pendidikan Islam. 2(1), 189–198.
- Hidayat, S. (2019). Implementasi pendidikan nilai multikulturalisme dalam pembelajaran Sejarah Indoensia. *Jurnal Artefak*, 6(2), 59-70.
- Ishak, D. (2022). Equality of education quality in Indonesia through education Reform. *Legal Brief*, 11(2), 472– 481.
- Jaysurrohman, R. A., Supandi, M., Wardani, M. T., Puthaen, M., & Setiawan, F. (2021). Problematika dalam Evaluasi Kebijakan Pendidikan di Indonesia. *BINTANG: Jurnal Pendidikan dan Sains*, 3(2), 215–227.
- Kasihadi, R. (2016). Optimalisasi Prestasi Peserta Didik Melalui Sistem Pendidikan yang Humanis: Suatu Perbandingan dengan Negara Maju. *Jurnal Widyatama*, 20(2), 145–151.
- Kristanti, I., Sumardi, S., & Umamah, N. (2019). The Character-Based Modules And Their Influence On Historical Awareness Of Students Of Class XI MIPA 4 SMAN PASIRIAN. *Jurnal Historica*, 3(1), 78-79.
- Lestariningsih, W. A., Jayusman, J., & Purnomo, A. (2018). Penanaman nilai-nilai multikultural dalam pembelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Rembang tahun pelajaran 2017/2018. *Indonesian Journal of History Education*, 6(2),

123-131.

- Merentek, T. C., Sumual, T. E., Usuh, E. J., & Kampilong, J. K. (2023). Perencanaan Sumber Daya Manusia dalam Pendidikan Masa Depan. *El-Idare: J*
- Munif, A. (2018). Potret masyarakat multikultural di Indonesia. *Journal Multicultural of Islamic Education*, 2(1).
- Muslim, A. Q., Suci, I. G. S., & Pratama, M. R. (2021). Analisis kebijakan pendidikan di jepang, finlandia, china dan indonesia dalam mendukung sustainable development goals. *Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar*, 6(2), 170-186.
- Musyadad, V. F., Hanafiah, H., Tanjung, R., & Arifudin, O. (2022). Supervisi Akademik untuk Meningkatkan Motivasi Kerja Guru dalam Membuat Perangkat Pembelajaran. *JIIP- Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(6), 1936-1941.
- Mutmainah, M., Hudaidah, H., & Yusuf, S. (2019). Pengaruh Media Pembelajaran Quipper School Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas XI Pada Mata Pelajaran Sejarah Di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Palembang. *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 8(1).
- Nasjum, Miftahul. R. P. (2020). Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Sejarah. *Jurnal Pendidikan*, 8(75), 147–154.
- Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). Metode penelitian kualitatif. *Solo: Cakra Books*, 1(1), 3-4.
- Nieto, S. (2017). Menegaskan Keberagaman: Konteks Sosial Politik Pendidikan Multikultural. Pearson.
- Oktavia, L. S., Nurhidayati, N., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan pendidikan: kerangka, proses dan strategi. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 95. <https://doi.org/10.29210/3003909000>.
- Parker, L., & Raihani, R. (2011). Democratizing Indonesia through Education ? Community Participation in Islamic Schooling. *Educational Management Administration & Leadership*, 39(6), 712–732. <https://doi.org/10.1177/174114321141638>.

- Prasetyo, G. (2021). Akulturasi masyarakat Pandhalungan: Aktualisasi pendidikan multikultural dalam pembelajaran Sejarah. *Education & Learning*, 1(1), 20-25.
- Puji, R. P. N. (2020). Implementation of Problem Based Learning with Audio Visual to Improve Critical Thingking and Learning Outcomes of historical subjects. *Jurnal Historica*, 4(1), 15-29.
- Putra, K. (2015). Resistansi Finlandia terhadap Global Educational Reform. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 4(1), 1393–1421.
- Rahman, Warsag, I., Amin., & Adisel. (2021). Penanaman nilai-nilai pendidikan multikultural bagi pendidik. *Jurnal Literasiologi*, 13.
- Ratmelia, Y. (2018). Nilai moral dalam buku teks pelajaran sejarah (analisis terhadap buku teks sejarah Indonesia Kelas X). *HISTORIA: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah*, 1, 2.
- Rijali, A. (2019). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81-95.
- Rozak, A. (2021). Kebijakan Pendidikan di Indonesia. *Journal of Islam Education*, 3(March), 1–19
- Saleh, A. M. (2020). Problematika Kebijakan Pendidikan di Tengah Pandemi dan Dampaknya Terhadap Proses Pembelajaran di Indonesia. *Jurnal Qiroah*, 10(2), 73–81. <https://doi.org/10.33511/qiroah.v10n2.73-81>
- Schinkel, A., De Ruyter, D. J., & Aviram, A. (2016). Education and Life’s Meaning. *Journal of Philosophy of Education*, 50(3), 398–418. <https://doi.org/10.1111/1467-9752.12146>.
- Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Supriandi, S., Lesmana, T., Subasman, I., Rukmana, A. Y., & Purba, P. M. (2023). Analisis Produktivitas Penelitian Pendidikan di Negara Berkembang: Perbandingan antara Negara di Asia Tenggara. *Jurnal Pendidikan West Science*, 1(07), 449-459.
- Swastika, K., Marjono., & Aini, Q. (2016). Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia Pada Awal Kemerdekaan Tahun 1945-1949. *Jurnal Pendidikan dan Humaniora*, 53 (1).

- Syahputra, M. A. D., Sariyatun, S., & Ardianto, D. T. (2020). Peranan penting sejarah lokal sebagai objek pembelajaran untuk membangun kesadaran sejarah Siswa. *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 4(1), 85- 94.
- Tintingon, J. Y., Lumapow, H. R., & Rotty, V. N. J. (2023). Problematika dan Perubahan Kebijakan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(2), 798-809.
- Ufie, A. (2014). Mengintegrasikan Nilai Nilai Multikulturalisme Berbasis Kearifan Lokal sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah. *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 3(2).
- Viennet, R and Pont, B. (2017). Education Policy Implementation. OECD Education Working Papers Series, 162, 375.
- Wales, R. (2022). Pendidikan Multikultural di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 1(01).
- Widodo, H. (2016). Potret Pendidikan di Indonesia dan Kesiapannya dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA). *Cendekia: Journal of Education and Society*, 13(2), 293. <https://doi.org/10.21154/cendekia.v13i2.250>.
- Yudi. (2020). Pendidikan yang Berkebudayaan: Histori, Konsepsi, dan Aktualisasi Pendidikan Transformatif. Bandung: Gramedia.